



**Judul** : Jangan Lahirkan RUU PDP Ambigu  
**Tanggal** : Selasa, 25 Januari 2022  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

**MI. 25/01/22. h. 3**

## Jangan Lahirkan RUU PDP Ambigu

BELEID yang mengatur perlindungan data pribadi (PDP) yang saat ini tengah berproses di parlemen harus berkekuatan dan tidak ambigu. Sejauh ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP itu pun belum memuat standar teknis pedoman perilaku yang harus dicapai atau diterapkan.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia Communication & Information System Security Research Center (CISS Rec ) Pratama Persadha mengingatkan hal itu saat dihubungi, kemarin.

“Bila hanya mengatur pedoman perilaku tanpa ada stan-

dar teknis apa yang harus dicapai, sama saja dengan saat ini akan terus terjadi kebocoran data akibat peretasan. Sepanjang tidak melawan hukum atau tidak ada kesengajaan melakukan pembocoran data, sebuah organisasi tidak akan bisa didenda atau dihukum,” ujar Pratama.

RUU PDP harus bisa memaksa pengendali data meningkatkan standar sistem informasi yang dikelolanya. Maka itu, lanjut Pratama, harus ada ketentuan denda bagi pengendali data pribadi yang mengalami kebocoran.

Baik itu karena peretasan,

kesalahan sistem, maupun adanya faktor pihak tertentu. Dengan demikian, UU PDP dan Komisi PDP akan fokus pada penegakan pasal-pasal yang sifatnya mendorong penguasa data pribadi melakukan berbagai kegiatan melindungi data pribadi masyarakat.

Pratama juga menyarankan UU PDP hanya mengatur sanksi administrasi dan denda. Bila mengatur sanksi pidana, dikhawatirkan terjadi kriminalisasi. “Bila dalam sebuah kasus ternyata ada terbukti melanggar hukum dan harus dikenakan pidana, nantinya bisa dilimpahkan ke pengadil-

an dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan KUHP,” imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan setiap pasal yang dibahas dalam RUU PDP merupakan poin krusial yang harus dibahas secara cermat dan hati-hati.

Politikus Golkar itu tidak bersedia berkomentar banyak tentang progres RUU yang pembahasannya cenderung mandek tersebut. Dave menyatakan masih menunggu pembahasan dalam rapat berikutnya. “Kita tunggu rapat panja, pekan ini juga akan digelar.” (Sru/P-2)